

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Sodiki dalam Moh Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara, 2011.
- Aartje Tehupeiory, Putusan Pengadilan Kasus Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, UKI Press, Jakarta, 2018.
- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Agus Yafli Tawas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum Unsrat, 2013.
- Agus Yafli Tawas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum Unsrat, 2013,
- Allen Buchanan, Justice, Legitimacy and Self-Determination, Oxford Political Theory, 2007.
- Andrew Gray, *Indigenous Rights and Development: Self-determination in an Amazonian Community* (Providence; Oxford: Berghahn Books, 1997).
- Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaanya, Jakarta, 2008.
- Charles R. Vort, Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2018.
- Dahrendolf, Ralf. 1958. Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis. American Journal of Sociology.
- David Raic, Statehood & the Law of Self-Determination. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2002.
- Edelamn. R.J. Konflik Interpersonal di Tempat Kerja, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Elly. M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ernie Tisnawati Sulem Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana, 2010.

- Fadhil Yazid, Pengantar Hukum Agraria, Undhar Press, Medan, 2020.
- Francesca Panzironi, Indigenous Peoples Right to Self Determination and Development Policy, Faculty of Law, University of Sydney.
- H. Lauer, Robert. (2001). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hairul SE. MM, Manajemen Risiko, Deepublish, Jakarta 2020.
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta; Grafindo Persada, 2010.)
- Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan: Panduan bagi Mahasiswa untuk Menegnal, Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Jakarta, Bumi Aksara. 2006.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015 hal 246.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Kalalo Flora, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, LoGoz Publishing, 2009.
- Kasidi, Manajemen Risiko, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Katzner, *“The Original Position and Veil of Ignorance”*, Ohio University, Ohio, 1980,
- Kusumartono, F. X. Hermawan. 2008. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Prospek dan Kendala Pengadaan Lahan Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Jurnal Komunitas Vol. 4 No. 3.
- Kwik Kian Gie, ”Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2002. Hal. 2.
- Leif Weinar, The Nature of Claim-Rights, 2015.
- Limbong, Bernard. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Pustaka Margareta.

Michel Seymour, *Internal Self-Determination and Secession, The Ashgate Research Companion to Secession*, 2013.

Mursid Raharjo, *Memahami Amdal, Graha Ilmu*, Yogyakarta, tahun.....

Pamungkas, Bagus Teguh. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Administrasi/Institusi terhadap Pertumbuhan Propinsi-propinsi di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

PBB General Recommendation XXI (48) pasal 4.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1999.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2015. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Kalsik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Jakarta: Kreasi Wacana.

Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994.

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2014.

Samuel Freeman, *Rawls-1st Edition*, Darden Business Publlising, Virginia, 2007.

Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, graha ilmu, Yogyakarta.

Septinus Lobat, 2015, *Pemekaran wilayah di Tanah Papua*, tollelegi, Jakarta Timur

Sharah Alisha, *Konflik Politik Antar Lembaga Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Soehartono, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003),

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Susan, Novi, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010.

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

Wulansari, Dewi. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Jurnal

Alston Phillips, Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Bayu Nanda Permana, Konflik dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta pada masa Pemerintahan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017), Jakarta, 2018

Budimansyah, D. "Fundamental Sociological Symptoms as a Source Occurance of Turbulence in Indonesian Society During The PostReform." 1st UPI International Conference on Sociology Education, (2015).

Dio Fabianto, Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat, 2056, Jurnal Teknologi Volume 11 Nomor 2 2014.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Sosialisasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wp-3-K, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2019,

Dr Mamhud M. Hanafi, Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Enterprise Risk Management, Modul 1, EKMA4262/ Modul.

dr. Muhammad Alfian, Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari, Development Policy and Management Review, Volume 1 Issue 2 Desember 2021.

Ebru Demir, The Right to Internal Self-Determination in Peacebuilding Process: A Reinterpretation of the Concept of Local Ownership from Legal Perspective, The Age of Human Rights Journal, 8 (June 2017).

Ervan Wirawan, Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-Mijokerto Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang, Jurnal Politik Muda, Vol.6 No.1 Januari Maret, 2017.

Ferry Hermawan, Pengaruh Pembebasan Lahan Terhadap Risiko Proyek Konstruksi (Studi Kasus Social Engineering Proyek Jalan Tol Ruas Semarang Bawen, Teknik. Vol32 No.2 Tahun 2011, ISSN 0852-1697.

- I Komang Darman, Mekanisme Pembebasan dan Pencabutan Hak atas Tanah, *Jurnal Belom Bahadat* : Volume VIII No.2, Juli-Desember, 2018,
- Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 1/Nomor 1/ Juni 2018.
- John Rawls, "Justice as Fairness: Political not Metaphysical," *Philosophy and Public Affairs* 14 (Summer 1985): 223.
- Mahmud M. Hanafi, Risiko, *Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management*, Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Manan Munafrizal, *The Right of Self-Determination; its Emergence, Development and Controversy*, Naskah Dosen Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2015.
- Olivia Rellua, Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Ronni Johan, *Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Lingkungan*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- S Eban Ebai, The Right to Self Determination and the Anglophone Cameroon Situationm The International Journal of Human Rights Vol. 13 No. 5.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud Md, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1987.
- Soiman Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Subekti, I. (2010). Implikasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut di Indonesia Berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). *QISTIE*.
- Suhardi, Anthon R tampubolon, *Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Framework ISO 31000:2009 Studi Kasus : Pembobolan ATM BCA Tahun 2010*, Institut Teknologi Bandung, 2014.
- Syairal Fahmy Dalimunthe, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 2018.
- Wijaya Hadim *Penyelesaian Konflik Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalur Alternatif (Studi Kasus Pembebasan Tanah di Desa Mekarsari)*, *Jurnal Juridica* Volume 4 Nomor 1, November 2022.

Yunianto Sadewa, Jawade Hafidz, Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas SOSial oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota Semarang, Jurnal Akta Vol.4 No. 2 Juni, 2017.

Makalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepemimpinan dan Manajemen Konflik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Halaman, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur wilayah, Jakarta, 2016.

Muhammad Azka Bintang Amffa, Kebijakan Reklamasi Pulau “G” dan Dampak terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Reklamasi, Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin, 03 November 2020.

Ida Yustina, Manajemen Konflik, 2020, lembar 33.

Akerina, F. O., Nurhayati, T., & Suwandi, R. (2015). Isolation and Characterization of Antibacterial Compounds from Sea Urchin. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia.

Lestiono, L., & Kresnamurti, A. (2020). AKTIVITAS ANALGESIK EKSTRAK ETANOL BULU BABI (ECHINOMETRA MATHAEI) PADA MENCIT PUTIH JANTAN. Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS), 1(02),

Germanakou Vasiliki, Substantiating the Right to Democratic Governance: Internal Self-Determination as a Means of Empowerment, LSE Working conference, 2007,

Undang Undang

Keppres No. 5 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perpres Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Tentang ???/

UNCLOS 1982

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Internet

https://www.law.cornell.edu/wex/self_determination_international_law
<http://genggaminternet.com/kebutuhan-dankelangkaan-sumber-daya-manusi>,
://www.academia.edu/9454123/KEBUTUHAN_MANUSIA_AKAN_RUAN`G_TERBUKA_HIJAU diakses pada 10 Mei 2023

<https://blog.excellence.asia/2018/06/07/5-strategi-manajemen-konflik/> diakses pada 10 Mei 2023

<https://glints.com/id/lowongan/exit-strategy-adalah/#.Y0EXNnZBzIU>
<https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/20558-tata-cara-reklamasi-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil> diakses pada 11 Mei 2023

https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/permasalahan-hat/Dr.%20Yani_HAT%20DI%20PERAIRAN%2C%20PERMASALAHAN%20DAN%20SOLUSI.pdf diakses pada 9 Januari 2023

https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/permasalahan-hat/Dr.%20Arif%20Havas_Hak%20Atas%20Tanah%20di%20Perairan%20Laut.pdf diakses pada 9 Januari 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160629201646-12-141925/koalisi-teluk-jakarta-bawa-bukti-kerugian-proyek-reklamasi> diakses pada 9 Januari 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/17/11172631/polemik-reklamasi-teluk-jakarta-di-tiga-tahun-pemerintahan-anies?page=all>. Diakses pada 7 Januari 2023

<https://www.unpo.org/article/4957> diakses pada 15 Mei 2023

<https://kemenag.go.id/read/menag-hak-kita-dibatasi-hak-orang-lain-nplll> diakses pada 15 Mei 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220302092003-20-765748/jakarta-tenggelam-air-laut-naik-atau-muka-tanah-turun> diakses pada 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/reklamasi-kebutuhan-keinginan/Paparan%20Reklamasi%20Pantai%20Utara%20PICT.pdf> diakses pada 20 Mei 2023

<https://metro.tempo.co/read/1636840/anies-baswedan-tolak-reklamasi-tapi-bikin-pergub-boleh-perluasan-daratan-apa-bedanya> diakses pada 20 Mei 2023

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/05/190100482/infografik--13-proyek-pulau-reklamasi-yang-dicabut-izinnya-oleh-anies> diakses pada 21 Mei 2023

<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a50d97f728/korban-proyek-reklamasi-dari-ahok-hingga-gubernur-kepri> diakses pada 21 Mei 2023

<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2016-03-19/reklamasi-teluk-jakarta-ahok-terbitkan-4-izin-foke-14-izin> diakses pada 21 Mei 2023

<https://news.detik.com/berita/d-3045109/izin-reklamasi-teluk-jakarta-diteken-foke-sebulan-sebelum-lengser> diakses pada 23 Mei 2023

<https://imenetwork.org/mediasi/memahami-konflik/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.mongabay.co.id/2016/07/07/ada-potensi-kerugian-rp1781-m-pada-reklamasi-teluk-jakarta/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.republika.co.id/berita/okoyxs354/tim-aniessandi-sosialisasi-reklamasi-teluk-jakarta-bentuk-pemaksaan> diakses pada 17 Februari 2023

<https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-ambisius-penuh-pelanggaran/#:~:text=Proyek%20Reklamasi%20Teluk%20Jakarta%20Melangg>

[ar%20Pasal%2031%20UU%20No.%2032,UU%20No.%2032%20Tahun%202009](#) diakses pada 18 Februari 2023

<https://evimariani.medium.com/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc> diakses pada 18 Februari 2023

<https://evimariani.medium.com/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc> diakses pada 25 Maret 2023

<http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/land-from-sand-singapores-reclamation-story/> diakses pada 18 Februari 2023

<https://ekbis.sindonews.com/read/1102063/34/rizal-ramli-hentikan-sementara-proyek-reklamasi-teluk-jakarta-1460984634> diakses pada 18 Februari 2023

